

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Legitimasi kekuasaan merupakan elemen sentral yang menentukan keberlanjutan sistem politik dalam masyarakat modern. Max Weber, melalui tipologi legitimasi yang berpengaruh, mengidentifikasi tiga bentuk otoritas yang melandasi kekuasaan; tradisional, karismatik, dan legal-rasional. Namun dalam praktiknya, legitimasi tidak selalu beroperasi secara murni dalam satu bentuk, melainkan sering kali terjalin melalui representasi simbolik yang kompleks dan berlapis. Salah satu manifestasi paling menarik dari fenomena ini adalah ketika logika kekeluargaan yang secara tradisional dianggap sebagai ranah privat, afektif, dan alamiah ditransformasikan menjadi instrumen legitimasi kekuasaan politik yang bersifat publik, strategis, dan terkalkulasi.

Dalam konteks komunikasi politik kontemporer, representasi simbolik tidak lagi dapat dipandang sekadar sebagai cerminan pasif dari realitas politik, melainkan sebagai medan aktif tempat makna diproduksi, dinegosiasikan, dan diperebutkan. Pitkin, dalam karyanya *The Concept of Representation*, telah menggarisbawahi bahwa representasi politik tidak terbatas pada dimensi elektoral dan institusional semata, tetapi juga mencakup dimensi simbolik yang beroperasi dalam berbagai ruang kultural masyarakat. Di tengah perkembangan teknologi media dan digitalisasi informasi, film sebagai medium budaya populer menempati posisi strategis dalam proses konstruksi dan diseminasi narasi politik yang membentuk

persepsi publik terhadap legitimasi kekuasaan. Film tidak hanya menghibur, tetapi juga mendidik, membentuk imajinasi kolektif, dan bahkan melegitimasi atau mendelegitimasi struktur kekuasaan tertentu melalui narasi yang dikonstruksinya.

Dalam memahami representasi politik kekeluargaan dalam *The Godfather* secara mendalam, terlebih dahulu perlu ditelusuri konteks historis yang melatarbelakangi munculnya organisasi mafia Italia-Amerika sebagai fenomena sosial-politik yang unik. Gelombang besar imigrasi Italia ke Amerika Serikat terjadi antara tahun 1880 hingga 1920, di mana lebih dari empat juta imigran Italia, sebagian besar berasal dari wilayah Sisilia dan Italia Selatan, meninggalkan tanah air mereka yang dilanda kemiskinan, konflik agraria, dan ketidakstabilan politik pasca-unifikasi Italia untuk mencari kehidupan yang lebih baik di Dunia Baru.

Akan tetapi realitas yang dihadapi para imigran Italia di Amerika Serikat jauh dari mimpi *American Dream* yang dijanjikan. Mereka tiba di negara yang tidak menyambut mereka dengan tangan terbuka, melainkan dengan diskriminasi sistemik, segregasi sosial, dan eksploitasi ekonomi. Komunitas Italia-Amerika, khususnya mereka yang berasal dari Sisilia, menghadapi marginalisasi ganda: secara ekonomi mereka terpaksa menempati posisi terendah dalam hierarki tenaga kerja, sementara secara kultural mereka dipandang sebagai *the other*, orang asing yang membawa serta bahasa, tradisi, dan nilai-nilai yang dianggap tidak sesuai dengan norma *Anglo-Saxon Protestant* yang dominan. Diskriminasi ini bukan hanya bersifat informal dalam bentuk prasangka sosial, tetapi juga terinstitusionalisasi dalam kebijakan imigrasi, praktik ketenagakerjaan, dan bahkan

dalam sistem peradilan yang sering kali memperlakukan imigran Italia dengan standar yang berbeda dan lebih keras.

Dalam kondisi marginalisasi dan ketidakpercayaan terhadap institusi negara yang gagal melindungi mereka, komunitas Italia-Amerika mengembangkan sistem proteksi informal yang berakar pada struktur sosial yang mereka bawa dari Italia Selatan. Di Sisilia jauh sebelum gelombang imigrasi ke Amerika, telah berkembang organisasi-organisasi lokal yang berfungsi sebagai penengah konflik, penyedia keamanan, dan pelaksana keadilan di luar sistem negara yang lemah dan korup. Organisasi-organisasi ini, yang kemudian dikenal sebagai mafia (meskipun etimologi kata ini masih diperdebatkan), beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip kekerabatan, loyalitas personal, dan kode kehormatan yang ketat.

Ketika struktur sosial ini ditransplantasikan ke Amerika Serikat, ia bertransformasi dalam konteks yang berbeda. Mafia Italia-Amerika, atau yang lebih dikenal sebagai *La Cosa Nostra* (“Hal Kita” atau “Organisasi Kita”), tidak lagi sekadar organisasi lokal yang menyediakan proteksi dalam skala kecil, melainkan berkembang menjadi jaringan kriminal terorganisir yang canggih, dengan struktur hierarkis yang jelas, pembagian wilayah operasi (*territories*), dan sistem *governance* internal yang kompleks. Mereka mengisi kekosongan struktural dalam masyarakat imigran yang tidak memiliki akses ke institusi formal negara, menyediakan pekerjaan, perlindungan fisik, mediasi konflik, dan bahkan fungsi-fungsi kesejahteraan sosial yang seharusnya disediakan oleh negara.

Era Prohibisi (1920-1933), yang melarang produksi dan penjualan alkohol di Amerika Serikat, menjadi titik balik yang menentukan dalam transformasi mafia dari organisasi proteksi lokal menjadi sindikat kriminal berskala nasional dengan kekuatan ekonomi dan politik yang sangat besar. Larangan alkohol menciptakan pasar gelap yang sangat menguntungkan, dan organisasi mafia, dengan struktur organisasional yang sudah mapan dan jaringan yang luas, berada dalam posisi ideal untuk mengeksploitasi peluang ini. Dalam periode ini, figur-figur seperti Al Capone di Chicago, Lucky Luciano di New York, dan berbagai boss mafia lainnya mengakumulasi kekayaan yang luar biasa, membangun kerajaan bisnis ilegal yang mencakup tidak hanya *bootlegging* (penyelundupan alkohol), tetapi juga perjudian, prostitusi, pemerasan, dan kemudian perdagangan narkoba.

Adapun signifikansi dari perspektif politik adalah bahwa organisasi mafia tidak beroperasi dalam isolasi dari institusi negara, melainkan justru membangun relasi simbiosis yang kompleks dengan struktur kekuasaan formal. Melalui korupsi sistemik, mereka menyusupi kepolisian, sistem peradilan, pemerintahan lokal, dan bahkan politik elektoral. Mafia menyediakan dana kampanye untuk politisi, memobilisasi suara pemilih dalam komunitas Italia-Amerika, dan sebagai imbalannya memperoleh proteksi dari penindakan hukum, akses ke kontrak-kontrak pemerintah, dan pengaruh dalam kebijakan publik. Dalam pengertian ini, mafia berfungsi sebagai semacam negara bayangan (*shadow state*) atau negara di dalam negara (*state within a state*) struktur kekuasaan paralel yang beroperasi di luar kerangka legal formal namun memiliki kapasitas untuk melaksanakan fungsi-fungsi yang biasanya merupakan monopoli negara: penegakan aturan, penyelesaian

konflik, pengumpulan pajak (dalam bentuk pemerasan), dan bahkan regulasi ekonomi (dalam pasar gelap).

Salah satu elemen kultural paling sentral yang membedakan mafia Italia dari organisasi kriminal lainnya adalah norma *omertà* (kode diam atau kode kehormatan yang melarang anggota organisasi untuk bekerja sama dengan otoritas negara atau membocorkan informasi internal organisasi kepada pihak luar). Kata *omertà* sendiri berasal dari kata Sisilia *omu* (manusia) atau *umirtà* (kerendahan hati), yang dalam konteks mafia mengacu pada kualitas maskulinitas yang ideal: keberanian untuk menyelesaikan konflik sendiri tanpa melibatkan otoritas eksternal, dan loyalitas absolut kepada keluarga dan organisasi.

Omertà bukan sekadar aturan pragmatis untuk menghindari penangkapan, tetapi merupakan sistem nilai yang mendalam yang tertanam dalam *worldview* mafia. Ia berfungsi sebagai mekanisme governance internal yang sangat efektif dalam organisasi yang tidak dapat mengandalkan kontrak legal atau penegakan hukum negara. Dalam organisasi kriminal, masalah fundamental yang dihadapi adalah bagaimana memastikan kepatuhan dan loyalitas dalam kondisi di mana anggota tidak dapat menuntut haknya melalui pengadilan jika dirugikan, dan di mana ancaman pengkhianatan kepada otoritas selalu ada. *Omertà* menyelesaikan masalah ini dengan mengkonstruksi pengkhianatan bukan hanya sebagai pelanggaran aturan organisasi, tetapi sebagai pelanggaran terhadap identitas fundamental seseorang sebagai “pria sejati” (*uomo d'onore*) dan sebagai pengkhianatan terhadap keluarga yang memberikan makna dan identitas.

Sanksi terhadap pelanggaran omertà bukan hanya hukuman fisik (yang biasanya adalah kematian), tetapi juga stigma sosial yang total. Seorang pengkhianat (*rat*, *snitch*) tidak hanya kehilangan perlindungan organisasi, tetapi juga kehilangan kehormatan, identitas, dan koneksi dengan komunitas yang menjadi sumber makna hidupnya. Lebih jauh lagi, sanksi sering kali diperluas kepada keluarga pengkhianat, menciptakan sistem tanggung jawab kolektif yang memperkuat tekanan untuk patuh.

Dari perspektif sosiologis, *omertà* dapat dipahami sebagai mekanisme yang mengatasi masalah *collective action* dan *principal agent problem* dalam organisasi ilegal. Ia menciptakan sistem trust yang tidak bergantung pada penegakan hukum eksternal, melainkan pada internalisasi nilai-nilai dan identitas bersama. Dalam pengertian ini, *omertà* mirip dengan konsep yang dikembangkan oleh Gramsci tentang hegemoni kultural: kekuasaan yang paling efektif bukan yang dijalankan melalui koersi terus-menerus, melainkan yang berhasil membuat subjek secara sukarela menerima dan menginternalisasi nilai-nilai yang melanggengkan struktur kekuasaan.

Konsep *shadow state* atau negara bayangan telah dikembangkan dalam literatur ilmu politik untuk menjelaskan fenomena di mana struktur kekuasaan non-negara beroperasi secara paralel dengan institusi negara formal, melaksanakan fungsi-fungsi yang biasanya merupakan monopoli negara, dan bahkan menyusupi atau mensubordinasi institusi-institusi formal tersebut. Reno (1995, 2000), dalam kajiannya tentang *shadow state* di Afrika, menunjukkan bagaimana elite tertentu membangun jaringan patronase informal yang mengontrol sumber daya ekonomi

dan politik di luar struktur birokrasi formal, menciptakan dualisme antara negara *de jure* dan kekuasaan *de facto*.

Mafia Italia-Amerika, dalam berbagai aspek, dapat dianalisis sebagai bentuk shadow state dalam konteks masyarakat urban Amerika pada abad ke-20. Organisasi ini tidak berupaya merebut kekuasaan negara secara frontal atau menggantikan institusi formal, melainkan beroperasi dalam *interstices* (celah-celah) sistem, mengisi kekosongan fungsional, dan membangun struktur kekuasaan paralel yang dalam banyak hal lebih efektif daripada institusi negara dalam menyediakan layanan tertentu kepada komunitas tertentu.

Dalam komunitas Italia-Amerika yang termarginalkan, mafia menyediakan fungsi-fungsi yang dalam teori politik modern seharusnya merupakan domain negara. Mereka menyediakan sistem keadilan alternatif: ketika seseorang mengalami konflik bisnis, perselisihan keluarga, atau viktimisasi kriminal, mereka dapat mengajukan “perkara” kepada *don* atau *capo* lokal, yang akan melakukan mediasi atau arbitrase berdasarkan aturan-aturan informal yang dipahami komunitas. Keputusan-keputusan ini memiliki legitimasi dalam komunitas dan dapat dienforce melalui ancaman kekerasan atau ostracism sosial. Mereka juga menyediakan fungsi proteksi: bisnis-bisnis membayar “pajak” (dalam bentuk uang proteksi) kepada mafia lokal dan sebagai imbalannya mendapatkan perlindungan dari kriminalitas dan jaminan bahwa konflik bisnis akan diselesaikan secara adil. Mereka bahkan menyediakan fungsi kesejahteraan sosial dasar: membantu imigran baru menemukan pekerjaan dan tempat tinggal, memberikan pinjaman kepada yang

membutuhkan (meskipun dengan bunga tinggi), dan menyediakan bantuan dalam keadaan darurat.

Yang membuat mafia sebagai *shadow state* sangat signifikan secara politik adalah bahwa legitimasi mereka tidak sepenuhnya bergantung pada pemaksaan, melainkan juga pada bentuk konsensus tertentu dalam komunitas. Gambetta (1993), dalam analisisnya tentang mafia Sisilia, menjelaskan bahwa mafia pada dasarnya adalah industri proteksi privat yang muncul dalam kondisi di mana negara gagal menyediakan proteksi *property rights* dan *enforcement* kontrak yang dapat diandalkan. Dalam konteks komunitas Italia-Amerika yang tidak mempercayai polisi (karena diskriminasi dan korupsi) dan tidak memiliki akses ke sistem hukum formal (karena hambatan bahasa, biaya, dan diskriminasi), mafia menyediakan alternatif yang, meskipun ilegal dan sering brutal, dipersepsikan sebagai lebih dapat diandalkan dan lebih adil dalam pengertian tertentu daripada institusi-institusi formal negara.

Lebih jauh lagi, mafia membangun legitimasi melalui narasi identitas dan perlawanan. Mereka mengkonstruksikan diri mereka bukan sebagai kriminal, melainkan sebagai pelindung komunitas Italia-Amerika terhadap diskriminasi dan eksploitasi oleh masyarakat dominan *Anglo-Saxon*. Dalam narasi ini, bisnis ilegal yang mereka jalankan dilegitimasi sebagai bentuk perlawanan terhadap hukum yang tidak adil (seperti *The Prohibition*, yang dipandang sebagai penerapan nilai-nilai Protestant terhadap budaya Katolik Mediterania yang menerima konsumsi alkohol), dan kekerasan yang mereka lakukan dilegitimasi sebagai pembelaan diri dalam masyarakat yang menentang.

Relasi antara mafia dan sistem politik formal juga menunjukkan karakteristik *shadow state*. Melalui korupsi sistemik, mafia tidak hanya menghindari penindakan hukum, tetapi juga memperoleh pengaruh dalam kebijakan publik. Mereka mempengaruhi siapa yang terpilih dalam pemilihan lokal, kebijakan apa yang diadopsi, kontrak publik mana yang diberikan kepada siapa, dan bahkan personel mana yang dipekerjakan dalam institusi penegak hukum. Dalam beberapa kasus, batas antara mafia dan pemerintahan formal menjadi sangat kabur, dengan politisi yang secara diam-diam berafiliasi dengan organisasi kriminal, dan bos mafia yang memiliki pengaruh yang lebih besar dalam komunitas daripada pejabat terpilih.

Konsep *shadow state* ini sangat relevan untuk memahami representasi dalam *The Godfather*, karena film tersebut tidak hanya menggambarkan organisasi kriminal, tetapi juga mengkonstruksi narasi tentang sistem kekuasaan alternatif yang memiliki logika internal, norma-norma, ritual-ritual, dan bahkan bentuk legitimasi sendiri yang dalam banyak aspek menyerupai struktur negara formal.

Dalam konteks historis dan sosiologis yang telah diuraikan, *The Godfather* (1972) karya sutradara Francis Ford Coppola muncul bukan hanya sebagai karya sinematografi yang luar biasa secara estetik, melainkan juga sebagai teks kultural yang kompleks yang mengkonstruksi representasi tertentu tentang kekuasaan, keluarga, dan legitimasi. Film yang diadaptasi dari novel *bestseller* Mario Puzo (1969) ini dirilis pada 15 Maret 1972 dan dengan cepat menjadi fenomena kultural yang melampaui batas-batas dunia hiburan semata.

The Godfather menghadirkan representasi yang sangat kompleks dan berlapis tentang struktur kekuasaan yang dilegitimasi melalui relasi kekerabatan. Film ini mengkonstruksi narasi di mana politik dan keluarga bukan dua *sphere* terpisah, melainkan dua entitas yang saling terjalin secara fundamental dalam pembentukan dan pelestarian otoritas. Paradoks yang menarik muncul dari konstruksi ini: bagaimana institusi keluarga, yang dalam ideologi modern liberal dipahami sebagai ranah privat yang ditandai oleh afeksi, keintiman, dan altruisme, dapat bertransformasi menjadi instrumen legitimasi kekuasaan yang bersifat kalkulatif, strategis, dan bahkan brutal?

Konsep kekeluargaan dalam *The Godfather* tidak dapat dipahami secara literal sebagai ikatan biologis semata. Film ini memperlihatkan bahwa *famiglia* (keluarga) dalam konteks Italia-Amerika dan khususnya dalam konteks mafia adalah konstruksi sosial-politik yang sangat kompleks. *Famiglia* tidak hanya merujuk pada keluarga inti, tetapi juga pada *extended family* yang mencakup kerabat jauh, dan bahkan lebih luas lagi, pada ikatan kekerabatan semu yang mengikat anggota organisasi mafia yang mungkin tidak memiliki hubungan darah sama sekali. Dalam film, kita melihat bahwa orang-orang seperti Tom Hagen (yang diadopsi oleh Vito Corleone) atau Clemenza dan Tessio (*caporegimes* dalam organisasi) diperlakukan mengidentifikasi diri sebagai bagian dari “keluarga”, dengan semua hak dan kewajiban yang melekat pada status tersebut.

Don Vito Corleone, sebagai figur patriark sentral dalam narasi film, tidak hanya menjalankan fungsi sebagai kepala keluarga dalam pengertian konvensional, tetapi juga sebagai pemimpin politik yang otoritasnya dilegitimasi melalui narasi

kekeluargaan yang disakralkan. Dalam adegan pembuka yang ikonik pernikahan putrinya Connie film dengan cemerlang memvisualisasikan dualitas peran Vito. Di satu sisi, kita melihat Vito sebagai ayah yang penuh kasih sayang, menari dengan putrinya, menikmati perayaan keluarga, merayakan sakramen Katolik yang sakral. Di sisi lain, di ruang kerja yang redup dalam rumah yang sama, Vito menerima “tamu-tamu” yang datang untuk meminta bantuan pertolongan, meminta keadilan yang tidak dapat mereka peroleh dari sistem legal formal, dan Vito, dengan otoritasnya yang tak tertandingi, mengabulkan atau menolak permintaan-permintaan ini dengan kekuasaan yang menyerupai kekuasaan seorang raja atau bahkan tuhan.

Sebelum lebih jauh dalam melakukan analisis *The Godfather* dan relevansinya dengan fenomena politik kontemporer, sangat penting untuk melakukan pembedaan konseptual yang jelas antara politik kekeluargaan (*familial politics* atau *politics of kinship*) dengan politik dinasti (*dynastic politics*). Meskipun kedua konsep ini sering digunakan secara bergantian dalam diskursus populer dan bahkan dalam beberapa literatur akademis, sesungguhnya keduanya merujuk pada fenomena yang berbeda meskipun saling terkait.

Politik dinasti, sebagaimana dikonseptualisasikan oleh Mendoza et al. (2012) dan Dal Bó et al. (2009), merujuk secara spesifik pada praktik politik di mana kekuasaan politik formal diwariskan atau didistribusikan di antara anggota keluarga yang memiliki hubungan darah atau pernikahan dalam periode waktu tertentu. Konsep ini memiliki karakter yang struktural dan dapat diukur secara empiris melalui identifikasi posisi-posisi politik formal (jabatan elektif atau

apointed) yang dikuasai oleh anggota dari keluarga yang sama. Dalam studi politik dinasti, peneliti biasanya menggunakan data elektoral dan komposisi pemerintahan untuk mengidentifikasi keluarga-keluarga yang secara konsisten menempatkan anggotanya dalam posisi kekuasaan.

Politik kekeluargaan, di sisi lain adalah konsep yang jauh lebih luas, kompleks, dan kultural yang melampaui sekadar pewarisan posisi formal. Eisenstadt dan Roniger (1984), dalam karya foundational mereka tentang *patron-client relations*, mengembangkan konsep politik kekeluargaan sebagai penggunaan logika, nilai-nilai, norma-norma, dan struktur kekerabatan sebagai prinsip pengorganisasian dalam arena politik. Politik kekeluargaan tidak terbatas pada transfer kekuasaan antara anggota keluarga biologis, tetapi mencakup aplikasi yang lebih luas dari norma-norma kekeluargaan seperti loyalitas personal, hierarki patriarkal, solidaritas organik, kewajiban resiprokal, dan subordinasi kepentingan individual kepada kepentingan kolektif keluarga dalam konteks politik.

Pembedaan konseptual ini memiliki relevansi yang sangat konkret untuk memahami fenomena politik di Indonesia kontemporer. Indonesia, sebagai demokrasi elektoral yang relatif muda (sejak reformasi 1998), telah mengalami proliferasi signifikan dari politik dinasti, khususnya di level lokal. Penelitian oleh Aspinall dan Berenschot (2019) menunjukkan bahwa dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) di Indonesia, semakin banyak kandidat yang memiliki hubungan kekerabatan dengan *incumbent* atau mantan pejabat.

Namun yang lebih penting dari sekadar jumlah dinasti adalah bahwa politik di Indonesia juga sangat ditandai oleh logika politik kekeluargaan. Pemimpin politik sering menggunakan retorika kekeluargaan untuk membingkai relasi mereka dengan konstituensi: rakyat sebagai “keluarga besar”, pemimpin sebagai “bapak” atau “ibu”, dan kebijakan sebagai bentuk “kepedulian keluarga”. *Patron-client relations*, yang merupakan manifestasi dari politik kekeluargaan, tetap menjadi cara dominan dalam mengorganisir mobilisasi politik dan distribusi sumber daya.

Penelitian ini secara khusus berkontribusi pada pengembangan kajian komunikasi politik, yang memahami politik bukan hanya sebagai proses institusional formal tetapi juga sebagai proses komunikatif di mana makna diproduksi, disebarluaskan, dan diperebutkan. McNair (2011), dalam *An Introduction to Political Communication*, mendefinisikan komunikasi politik sebagai “*purposeful communication about politics*”, yang mencakup tidak hanya komunikasi oleh aktor politik (*political actors*) dan tentang aktor politik dan kegiatan mereka, tetapi juga komunikasi yang ditujukan kepada aktor-aktor tersebut oleh *non-politicians* seperti pemilih dan kolumnis surat kabar dan juga, dapat ditambahkan, oleh filmmaker dan cultural producers lainnya.

Dalam kerangka komunikasi politik, media massa, termasuk film, tidak dipahami sebagai cermin pasif yang simpel merefleksikan realitas politik, melainkan sebagai agen aktif yang mengkonstruksi representasi tertentu tentang realitas politik, yang kemudian membentuk bagaimana publik memahami, menafsirkan, dan merespons fenomena politik. Seperti yang dikemukakan oleh Corner dan Pels (2003) dalam *Media and the Restyling of Politics*, media telah

menjadi “pendefinisi utama dari realitas politik” bagi sebagian besar warga negara yang tidak memiliki akses langsung ke proses politik.

Film sebagai medium komunikasi massa yang memiliki kapasitas unik untuk mengkombinasikan narasi, visual, audio, dan emosi dalam paket yang immersive dan engaging, memiliki potensi yang sangat besar untuk membentuk pemahaman publik tentang politik. Seperti dikemukakan oleh Giglio (2014) dalam *Here’s Looking at You: Hollywood, Film, and Politics*, *Hollywood films* telah berperan penting dalam membentuk *political imaginary* Amerika dan global, termasuk bagaimana publik memahami konsep-konsep seperti *heroism*, *patriotism*, *justice*, *corruption*, dan *power*.

Dalam konteks ini, film *The Godfather* bukan sekadar hiburan, melainkan juga bentuk komunikasi politik yang kuat. Film ini menyampaikan narasi spesifik tentang bagaimana kekuasaan beroperasi, bagaimana kekuasaan dilegitimasi, nilai-nilai apa yang penting dalam politik, dan struktur politik seperti apa yang dianggap “alami” atau “tak terelakkan.” Yang lebih penting lagi, karena film ini disajikan sebagai medium keluarga daripada thriller politik, dan karena konstruksi naratifnya yang canggih dan ambigu secara moral, pesan-pesan politik yang terkandung di dalamnya beroperasi pada tingkat yang lebih halus dan mungkin lebih persuasif daripada propaganda politik yang eksplisit.

Urgensi penelitian ini semakin diperkuat oleh perkembangan teknologi media dan digitalisasi yang memperluas jangkauan dan memperpanjang eksistensi dari teks-teks kultural seperti *The Godfather*. Dalam era sebelum streaming digital,

akses terhadap film klasik terbatas: setelah periode di bioskop, film hanya bisa diakses melalui televisi (dengan jadwal yang tidak fleksibel) atau penyewaan video fisik. Namun, dengan munculnya platform streaming seperti Netflix, Amazon Prime, HBO Max, dan Paramount+, film-film klasik seperti *The Godfather* kini dapat diakses kapan saja, di mana saja, oleh audiens global yang sangat luas.

Lebih jauh lagi, di era media sosial teks-teks film tidak lagi dikonsumsi secara pasif dan terisolasi, melainkan telah menjadi bahan diskursus publik, penafsiran ulang, dan adaptasi dalam berbagai konteks. Meme yang diadaptasi dari *The Godfather*, kutipan-kutipan ikoniknya, serta referensi visualnya sering digunakan dalam wacana politik di media sosial untuk mengomentari fenomena politik kontemporer. Misalnya, metafora “memberikan tawaran yang tidak bisa mereka tolak” sering digunakan untuk menggambarkan taktik politik yang memaksa yang disajikan sebagai transaksi; citra Marlon Brando sebagai Don Vito sering digunakan untuk menggambarkan sosok bos politik yang berkuasa dan otoriter mengancam, namun juga dihormati dan disegani.

Berangkat dari beberapa kompleksitas tersebut, peneliti mengangkat penggunaan media film ini serta dapat menunjukkan bahwa *The Godfather* bukanlah sekadar artefak sejarah, melainkan sebuah teks yang hidup yang terus-menerus ditafsirkan ulang dan diterapkan untuk memahami realitas politik kontemporer. Dalam konteks inilah penelitian mengkaji mekanisme representasi film tersebut menjadi fondasi kuat untuk memahami bagaimana representasi yang dibangun lebih dari lima dekade lalu terus membentuk atensi dan diskursus politik masa kini.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana representasi politik kekeluargaan dikonstruksi sebagai alat legitimasi kekuasaan dalam film *The Godfather* (1972)?

1.3 Tujuan Penelitian

Menganalisis representasi politik kekeluargaan sebagai alat legitimasi kekuasaan dalam film *The Godfather* (1972)

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini memberikan kontribusi pada pengembangan studi representasi politik dengan memperluas pemahaman mengenai dimensi kultural-simbolik dari legitimasi kekuasaan. Penelitian ini menawarkan perspektif semiotika dalam menganalisis bagaimana narasi politik kekeluargaan dikonstruksi dan dinaturalisasi melalui medium film, sehingga memperkaya diskursus ilmu politik khususnya terkait hubungan antara representasi budaya populer dan legitimasi kekuasaan. Temuan penelitian ini diharapkan dapat melengkapi pendekatan struktural-institusional dalam kajian politik kekeluargaan dengan menyediakan kerangka analitis untuk memahami mekanisme representasional yang beroperasi dalam ruang kultural.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan kritis bagi masyarakat, akademisi, dan praktisi komunikasi politik mengenai cara kerja narasi kekuasaan kekeluargaan dalam media massa. Pemahaman terhadap

strategi representasi simbolik yang digunakan untuk melegitimasi politik kekeluargaan dapat meningkatkan literasi kritis publik dalam mengonsumsi produk budaya populer yang bermuatan ideologis. Selain itu, temuan penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi peneliti selanjutnya yang tertarik mengkaji interaksi antara representasi media, konstruksi legitimasi, dan wacana politik kontemporer, khususnya dalam konteks Indonesia di mana fenomena dinasti politik masih menjadi isu yang relevan